



Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Subak Kabupaten Bangli

Komang Sriwulandari^{*a}, I Dewa Ayu Putri Wirantari^a, Ni Putu Anik Prabawati^a

^a Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: omingwulandari20@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Subak Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan indikator penelitian yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (2009) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih belum berjalan secara optimal. Dengan demikian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli perlu melakukan penyempurnaan disetiap indikator. Rekomendasi yang dapat penulis berikan pada penelitian ini yaitu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli dapat melakukan akurasi pendataan petani penerima pupuk bersubsidi, perekrutan pegawai magang untuk melaksanakan penyuluhan dan perbaikan penjadwalan penyuluhan dan pendampingan kepada petani.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Peningkatan Produksi Padi

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the Subsidized Fertilizer Distribution Policy is implemented in an effort to increase rice production in Subak, Bangli Regency, using qualitative methods and using research indicators proposed by George C. Edwards III (2009), namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this research show that communication, resources, disposition and bureaucratic structure are still not running optimally. Thus, the Department of Agriculture, Food Security and Fisheries of Bangli Regency needs to make improvements to each indicator. extension and improving the scheduling of extension and assistance to farmers.

Keywords: Policy Implementation, Distribution of Subsidized Fertilizer, Increase in Rice Production

1. Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam penyediaan bahan pangan serta berdampak secara langsung terhadap kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yaitu nasi. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, maka kebutuhan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, penyediaan pasokan beras perlu ditingkatkan. Peningkatan jumlah pasokan beras dilakukan dengan peningkatan jumlah produksi padi. Peningkatan jumlah produksi padi masih menjadi persoalan dan perhatian pemerintah Indonesia. Menurunnya jumlah produksi padi di Indonesia menjadi tanggungjawab petani dan pemerintah. Peran petani dan pemerintah diperlukan guna meningkatkan jumlah produksi padi. Peningkatan jumlah produksi padi oleh petani dilakukan dengan tetap menanam padi dan meningkatkan jumlah produksi padi. Sedangkan peran pemerintah yaitu membantu petani dengan menjaga ketersediaan bahan-bahan pendukung peningkatan produksi padi oleh petani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian mengamanatkan bahwa, Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memenuhi serta mendukung

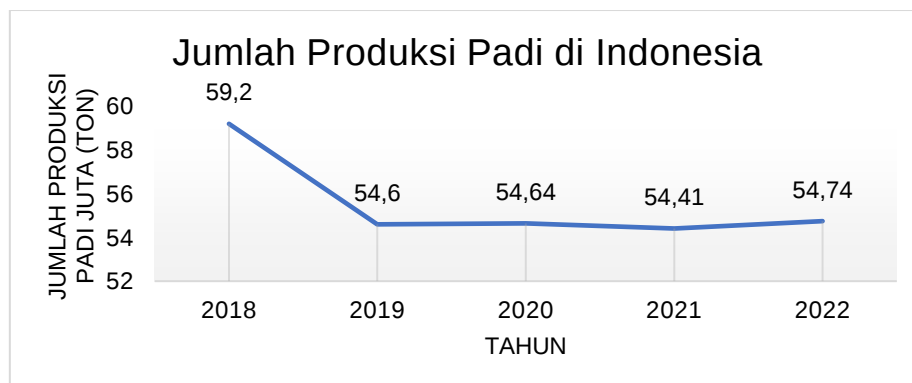
proses produksi pangan. Dalam pemenuhan pupuk bersubsidi, Menteri Perdagangan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian serta PT. Pupuk Indonesia (PERSERO) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani. Sehingga, dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani diperlukannya pengimplementasian kebijakan untuk yang optimal dan tepat sasaran guna tercapainya tujuan dari terbentuknya kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk sebuah tindakan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan tahapan kebijakan yang mulai dialirkan ke ranah publik sesuai dengan isi atau aturan yang telah ditetapkan agar tercapainya tujuan-tujuan tertentu dan menganalisis keberhasilan aturan yang sedang dijalankan dalam menanggulangi masalah. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan suatu kebijakan, pemenuhan janji-janji dan poin-poin yang dinyatakan atau tercantum dalam dokumen kebijakan, dan pencapaian hasil yang ditentukan dalam tujuan kebijakan.

Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam untuk membeli pupuk. Penggunaan pupuk diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas padi dan peningkatan jumlah hasil produksi padi. Sehingga menjadikan pupuk sebagai sarana bagi petani yang memiliki peran penting. Pemakaian pupuk disesuaikan dengan dosis yang telah dianjurkan sesuai dengan luas lahan pertanian yang dimiliki petani. Kondisi dilapangan yang menunjukkan bahwa dengan daya beli pupuk bagi petani yang semakin menurun sehingga menyebabkan petani cenderung tidak memperhatikan dosis anjuran pemupukan. Dengan tidak memperhatikan dosis anjuran pemupukan menyebabkan jumlah dan kualitas hasil padi menjadi menurun.

Jumlah produksi padi di Indonesia selama 5 tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan masih adanya permasalahan produksi padi di Indonesia. Permasalahan tersebut diuraikan dengan hasil produksi padi yang tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

Gambar 1. Jumlah Produksi Padi di Indonesia



Sumber: Katadata

Berdasarkan data tabel diatas produksi padi di Indonesia mulai tahun 2018-2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tahun 2018 produksi padi sebanyak 59,20 juta ton dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 54,6 juta ton. Pada tahun 2020 produksi padi mengalami kenaikan yang tipis menjadi 54,64 juta ton dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 54,41. Kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan yang tipis dibanding tahun sebelumnya menjadi 54,74 juta ton. Capaian ini mengalami kenaikan secara tipis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih dikatakan rendah karena tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Sama halnya dengan Kabupaten Bangli, hasil produksi padi selama 5 tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan masih adanya permasalahan dalam upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Bangli. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi masih dianggap belum maksimal dikarenakan belum adanya peningkatan jumlah produksi padi setelah adanya kebijakan tersebut. Permasalahan tersebut diuraikan dengan hasil produksi padi yang tidak mengalami kenaikan secara signifikan seperti pada grafik dibawah ini.

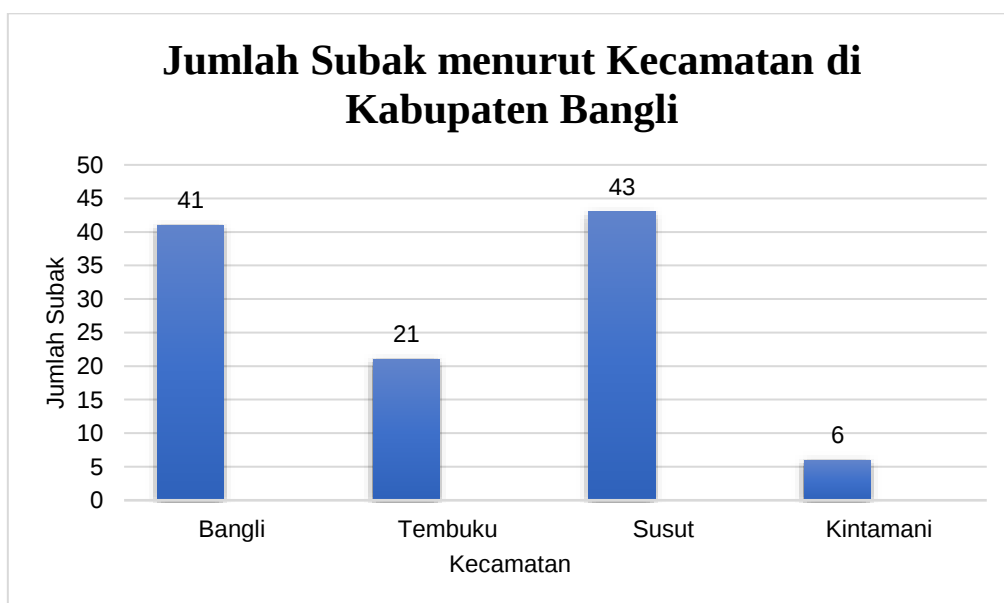
Tabel 1. Jumlah Produksi Padi menurut Kabupaten di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bangli	13 945,90	13 401,04	13 626,32	19 653,20	21 630,80
2	Klungkung	18 097,33	28 689,54	25 764,98	24 805,55	25 734,39
3	Denpasar	24 980,48	18 255,46	23 697,05	25 340,89	29 948,63
4	Karangasem	49 905,05	40 624,56	41 009,95	40 868,57	52 090,59
5	Jembrana	61 005,02	60 128,88	47 178,10	50 258,40	58 158,77
6	Buleleng	82 272,33	73 120,50	62 836,23	82 975,62	90 707,72
7	Badung	109 583,33	85 475,63	83 587,23	90 233,06	99 406,39
8	Gianyar	118 833,44	100 867,49	91 622,56	117 895,26	133 658,86
9	Tabanan	188 446,18	158 757,43	142 846,03	166 880,26	169 265,45
	BALI	667 069,06	579 320,53	532 168,45	618 910,81	680 601,60

Sumber: BPS Provinsi Bali

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi padi di Kabupaten Bangli tidak mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2018-2022. Kabupaten Bangli juga menjadi salah satu Kabupaten yang menghasilkan jumlah produksi padi yang paling rendah. Rendahnya jumlah produksi padi di Kabupaten Bangli perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangli dalam memaksimalkan kebijakan pupuk bersubsidi oleh pemerintah guna meningkatkan produksi padi di Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli memiliki peluang dalam meningkatkan jumlah produksi padi. Hal ini didukung pula dengan jumlah lahan pertanian yang dimiliki Kabupaten Bangli disetiap Kecamatannya yang tergolong cukup banyak.

Gambar 1. Jumlah Subak menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli



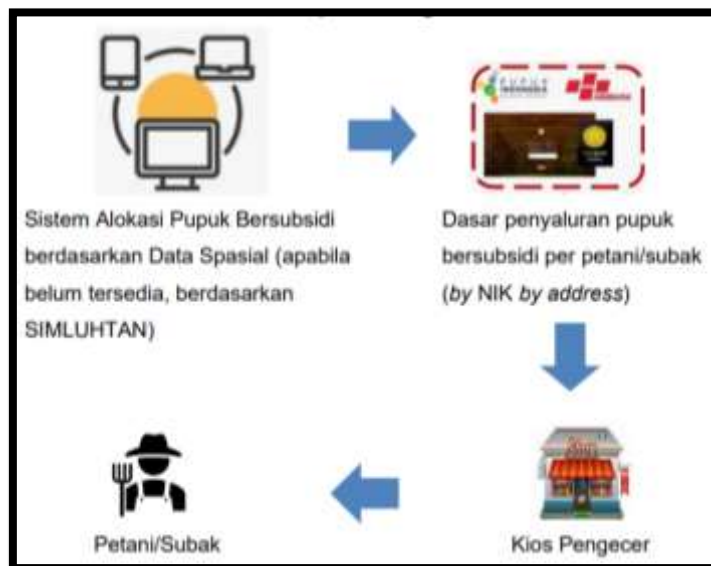
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Bangli memiliki Kecamatan 4 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, Kecamatan Susut dan Kecamatan Kintamani. Masing-masing Kecamatan memiliki jumlah subak yang berbeda-beda. Kecamatan Bangli memiliki subak sebanyak 41 subak, Kecamatan Tembuku sebanyak 21 subak, Kecamatan Susut sebanyak 43 subak dan Kecamatan Kintamani sebanyak 6 subak. Berdasarkan data jumlah subak disetiap Kecamatan di Kabupaten Bangli jika dijumlahkan sebanyak 111 subak yang dimiliki Kabupaten Bangli. Berdasarkan jumlah subak yang dimiliki Kabupaten Bangli dapat dikatakan Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang memiliki subak atau lahan pertanian yang tergolong cukup banyak. Sehingga, dilihat dari jumlah subak yang dimiliki, Kabupaten Bangli memiliki potensi dalam meningkatkan jumlah produksi padi. Namun, pada realitanya Kabupaten Bangli menjadi salah satu Kabupaten yang menghasilkan jumlah produksi padi paling rendah.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara proporsional sesuai dengan RDKK yang telah disusun oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai penyuluh bersama dengan kelompok tani sesuai dengan alokasi pupuk yang telah disediakan. Pengalokasian pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan RDKK dengan alokasi pupuk subsidi yang telah disediakan. Selain pengalokasian, harga penjualan pupuk bersubsidi oleh pengecer resmi yaitu kios/pengecer ke petani harus sesuai dengan HET yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi disetiap Pemerintah Daerahnya. Penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen ke konsumen/petani harus sesuai dengan 6 prinsip yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

Secara teknis pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangli disalurkan oleh tiga anak perusahaan Pupuk Indonesia selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya yaitu Perusahaan Pedagang Indonesia, CV Agrotani Lestari dan PUSKUD Bali Dwipa. Kemudian melalui perusahaan tersebut diteruskan kembali ke kios atau pengecer yang ada disetiap Kecamatan di Kabupaten Bangli. Dalam penyalurannya Pupuk Indonesia memiliki jaringan distribusi yang baik di Kabupaten Bangli. Berdasarkan teknis penyaluran pupuk melalui distributor sampai ke pihak pengecer, kemudian adapun alur pelaksanaan pembelian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangli.

Gambar 2. Alur Pelaksanaan Pembelian Pupuk Bersubsidi oleh Petani di Kabupaten Bangli



Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli

Berdasarkan tahapan diatas, petani/subak di Kabupaten Bangli mendaftarkan diri sesuai dengan data luas lahan ke sistem yang di bantu oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan. Melalui sistem ini dengan memasukan data lahan komoditas kemudian akan diperkirakan berapa pupuk yang diperlukan dan ditebus oleh setiap petani sesuai dengan kebutuhan lahan komoditasnya. Selanjutnya, apabila petani ingin menebus pupuk bersubsidi berdasarkan dengan NIK (Nomor Induk Keluarga) yang sudah tercatat oleh sistem. Penebusan pupuk bersubsidi dilakukan di kios/pengecer yang sudah ditetapkan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Subak Kabupaten Bangli.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Cresswell, 2009:4). Fokus penelitian kualitatif terletak pada makna dan deskripsi yang umumnya

disampaikan dalam bentuk kata-kata dibandingkan angka-angka. Adapun jenis penelitian deskriptif ialah penelitian yang menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi ataupun permasalahan (Neuman, 2017:44).

Jenis penelitian kualitatif dipilih sebab penulis ingin memberikan gambaran terperinci mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, penulis tidak memanipulasi kondisi sosial yang terjadi sebagai bahan objek penelitian penulis dan membiarkan objek penelitian berjalan apa adanya. Metode penelitian deskriptif kualitatif menjadi penting dalam penelitian ini dikarenakan mampu menjabarkan secara spesifik dan sistematis mengenai implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dalam upaya peningkatan produksi padi di subak Kabupaten Bangli.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dalam upaya peningkatan produksi padi di subak Kabupaten Bangli menggunakan dua sumber data, yaitu: Data Primer dan sekunder.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung dan data primer ini berupa data yang otentik, objektif dan reliabel karena data tersebut digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan (Nasution, A. F. 2023:6). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada informan terkait penyaluran pupuk bersubsidi pada setiap subak di Kabupaten Bangli. Selain itu, penulis juga memperoleh data dari observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yakni di Subak Kabupaten Bangli, Kios/Pengecer Kabupaten Bangli dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan diluar dari subjek penelitian dan data sekunder bersifat pelengkap dan penguat dari data primer (Nasution, A. F. 2023:6). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi. Data sekunder diperlukan sebagai penunjang data primer, dalam penelitian ini juga mengambil data sekunder dari penelitian terdahulu yang relevan melalui pencarian pada laman *Google Scholar* dengan kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Peningkatan Produksi Padi

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, benda, serta suatu layar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi 2005:75–76). Dalam penelitian ini, unit analisis yang dimaksud adalah unit analisis individu. Adapun yang termasuk unit analisis individu dan kelompok. Adapun unit analisis individu petani dari beberapa Kecamatan. Sedangkan unit analisis kelompok dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Melalui unit analisis tersebut penulis berharap bisa menggambarkan penyaluran pupuk bersubsidi pada subak dalam upaya peningkatan produksi padi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli.

Lokasi penelitian ini yaitu di Subak Kabupaten Bangli dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli.

Teknik penyajian data merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir untuk menggambarkan kesimpulan dari hasil penelitian (Samsu, 2017). Teknik ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dan dianalisis dapat disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih baik.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Rangkuman Hasil Temuan di Lapangan

No.	Indikator	Hasil Temuan
1.	Komunikasi	• Proses transmisi/ arus komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangli cukup pendek. Pendeknya proses arus komunikasi dan pendeknya jalur birokrasi menjadi salah tercapainya komunikasi yang baik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. • Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli masih kurang optimal. Petani masih kurang memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sehingga hal ini dapat beresiko

	dalam proses penebusan pupuk bersubsidi. Dinas masih kurang memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media untuk memberikan informasi kepada petani. • Konsistensi dalam pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli masih belum berjalan optimal. Penyuluhan kepada kios/pengecer dan petani tidak dilaksanakan secara rutin dan terjadwal. Hal ini dikarenakan kurangnya penyuluh untuk mendampingi kios/pengecer dan petani, dengan jumlah penyuluh sebanyak 47 orang masih kurang untuk mendampingi petani sebanyak 8.453 orang petani yang ada di 72 desa di Kabupaten Bangli. Pendampingan kepada petani dan kios/pengecer secara rutin dan terjadwal dapat membantu memberikan pemahaman kepada petani dan kios serta membantu apabila mengalami kesulitan dan kendala selama penebusan pupuk bersubsidi
2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia • Untuk jumlah penyuluh masih dikatakan kurang untuk petani, selain itu jumlah desa di Bangli yaitu 72 desa. Jumlah penyuluh yang ada di dinas masih kurang untuk melakukan penyuluhan dan mendampingi petani. Sehingga masih adanya petani yang tidak mengikuti penyuluhan di desanya dan tidak didampingi oleh Dinas. Hal ini menjadi faktor dalam mempengaruhi pemahaman petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi. b. Sumber Daya Non Manusia • Sumber Daya Non Manusia berupa fasilitas atau sarana prasarana penunjang kebutuhan pada saat proses pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi. Saat ini, sarana dan prasarana hardware dan software di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli belum memadai. Jadi sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan belum terpenuhi. Fasilitas itu bisa berupa laptop, modem internet bahkan dana operasional. Namun, penyuluh dalam melaksanakan tugasnya masih mengalami kesulitan karena kurangnya fasilitas yang menunjang proses pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi seperti laptop, modem internet.
3. Disposisi	• Tiap kios/pengecer di Kabupaten Bangli memanfaatkan aplikasi <i>I-Pubers</i> dalam penebusan pupuk subsidi oleh petani. Aplikasi ini berisi data petani seperti nama, dosis pupuk yang didapatkan sesuai RDKK, sisa dosis pupuk dapat ditebus serta pelaksanaan transaksi pupuk juga dilakukan melalui aplikasi ini. Pemanfaatan aplikasi <i>i-pubers</i> di salah satu kios/pengecer di Kabupaten Bangli berjalan efektif dan membantu kios/pengecer memudahkan pelaksanaan penebusan pupuk subsidi. • Disposisi atau sikap aktor berdasarkan 6 prinsip tepat tidak dapat berjalan secara optimal. Keterlambatan kedatangan pupuk hingga sampai ke pihak kios/pengecer menjadi kendala bagi petani dalam penebusan pupuk subsidi. Sikap kurangnya disiplin waktu oleh para aktor yang terlibat dalam mendatangkan pupuk menjadikan kendala bagi petani yang ingin menebus pupuk.
4. Struktur Birokrasi	• Regulasi terkait dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sering mengalami perubahan di tiap tahunnya, pihak Dinas mengalami kesulitan dalam memberikan penyuluhan terkait dengan seringnya terjadi perubahan regulasi. • Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli telah membagi tugas kepada pegawainya dalam pelaksanaan pengimplementasian penyaluran pupuk bersubsidi. Pembagian tugas sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan Dinas dan masyarakat.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Pembahasan

Komunikasi

Indikator komunikasi merupakan hal yang dapat dirasakan secara langsung oleh petani yang membutuhkan pelayanan sehingga komunikasi dapat dikatakan baik apabila petani mampu memahami kebijakan

penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga penting untuk pelaksana pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi memahami isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan telah berupaya untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas. Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan.

Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi. Komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Hal pertama yang dilakukan setelah ditetapkannya kebijakan oleh pusat, kemudian Dinas menindaklanjuti dengan komunikasi dengan bidang yang berkaitan yang bertugas. Kemudian dari bidang tersebut memmmberikan komunikasi berupa informasi terkait pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak kios/pengecer dan petani. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan dengan baik, dan optimal dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan atau daya tangkap pihak kios/pengecer dan petani dalam menangkap serta memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya juga menjadi faktor penting dalam pengimplementasian kebijakan. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya sumber daya implementasi kebijakan sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya dibagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia berkaitan dengan banyanya jumlah pelaku pelaksana pelayanan dalam hal penyuluhan dan pendampingan kepada setiap petani. Sumber daya non manusia berkaitan dengan penunjang pelaksana pengimplementasian kebijakan berupa sarana dan prasarana. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli masih kekurangan sumber daya manusai untuk melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada petani. selain itu dalam sumber daya non manusia penyuluh mengalami kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada petani. hal ini terlihat penyuluh masih mengandalkan barang pribadi setiap penyuluhan untuk membantu menunjang pelaksanaan pelayanan pupuk bersubsidi. Keterbatasan sumber daya non manusia tersebut yang menyulitkan penyuluh dalam melaksanakan pelayanan.

Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Dalam pelaksanaan pengimplementasian penyalran pupuk bersubsidi ada 6 prinsip tepat yang harus dilaksanakan. Sikap aktor didasari berdasarkan dengan 6 prinsip tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Sikap berdasarkan dengan 6 prinsip tepat menunjukan bahwa pengimplementasian kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Sikap dengan berdasarkan 6 prinsip tepat inilah yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan optimal atau tidak.

Pengimplementasian kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli disposisi atau sikap aktor berdasarkan 6 prinsip tepat tidak dapat berjalan secara optimal. Keterlambatan kedatangan pupuk hingga sampai ke pihak kios/pengecer menjadi kendala bagi petani dalam penebusan pupuk subsidi. Sikap kurangnya disiplin waktu oleh para aktor yang terlibat dalam mendatangkan pupuk menjadikan kendala bagi petani yang ingin menebus pupuk kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan dinilai sudah baik. Namun, dalam pemanfaatan aplikasi *i-pubers* sudah berjalan secara efektif. Penebusan pupuk subsidi menggunakan aplikasi

i-pubers memudahkan kios/pengecer dalam pennebusan pupuk subsidi. Pemanfaatan aplikasi *i-pubers* diharapkan dimaksimalkan guna mengurangi kecurangan dalam pennebusan pupuk subsidi. Sehingga, proses penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran ke petani.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja, SOP ini menjadi acuan untuk setiap pelaksana pelayanan, serta kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi ini diawasi oleh hukum dan apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, struktur organisasi pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli mengenai regulasi yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sering mengalami perubahan di tiap tahunnya, pihak Dinas mengalami kesulitan dalam memberikan penyuluhan terkait dengan seringnya terjadi perubahan regulasi.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli telah membagi tugas kepada pegawainya dalam pelaksanaan pengimplementasian penyaluran pupuk bersubsidi. Pembagian tugas sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan Dinas dan masyarakat. Pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Walaupun regulasi sering mengalami perubahan disetiap tahunnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli tetap melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Subak Kabupaten Bangli dapat dikatakan berjalan dengan baik namun belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengimplementasian kebijakan. Walaupun demikian, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli perlu melakukan pembenahan dan pengoptimalan pada beberapa hal, terutama pada indikator komunikasi, dan sumber daya. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III (2009) yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun kesimpulan dari masing-masing indikator tersebut yaitu:

1. Indikator komunikasi belum berjalan secara optimal. Komunikasi yang dilakukan berupa komunikasi secara internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi antar kepala dinas, pegawai dan penyuluh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Komunikasi eksternal terjadi di antara kepala bidang beserta staff dan penyuluh di bidang pengolahan sarana dan prasarana pertanian dengan kios/pengecer dan petani. Komunikasi internal sudah berjalan secara optimal, kepala dinas, pegawai dan penyuluh yang bertugas turun kelapangan untuk memberikan penyuluhan kepada kios/pengecer dan petani sudah memahami tugasnya. Namun, komunikasi secara eksternal yang terjadi di antara penyuluh dengan kios/pengecer dan petani masih belum berjalan secara optimal. Kios/pengecer dan petani masih belum memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini menyebabkan petani masih kesulitan dalam proses pennebusan pupuk bersubsidi pada kios/pengecer.
2. Indikator sumber daya masih belum berjalan optimal. Indikator sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia yang dilihat berdasarkan jumlah penyuluh yang turun langsung kelapangan mendampingi dan melakukan penyuluhan kepada kios/pengecer dan petani masih kurang. Masih terdapat kios/pengecer dan petani yang tidak mendapatkan dampingan oleh pihak dinas, hal ini tentu membuat pemahaman kios/pengecer dan petani masih kurang. Selain itu, sumber daya non manusia yang masih kurang. Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi seperti laptop, modem internet bahkan dana operasional.

3. Indikator disposisi belum sepenuhnya berhasil sebab masih adanya faktor penghambat seperti kurangnya kedisiplinan aktor dalam ketepatan waktu kedatangan pupuk subsidi hingga ke kios/pengecer. Sehingga tiap awal tahun sering mengalami keterlambatan kedatangan pupuk. Namun, dalam pemanfaatan aplikasi i-pubers Dinas Pertanian, Ketahanan pangan dan Perikanan mampu menyampaikan kepada kios/pengecer terkait dengan mekanisme dan pemanfaatan aplikasi i-pubers. Sehingga aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal di Kabupaten Bangli. selain itu, apabila dilihat melalui sikap pegawai dan penyuluh terlihat adanya kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan yang dinilai sudah baik.
4. Indikator struktur birokrasi belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli. Hal ini terlihat apabila dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan SOP atau prosedur-prosedur kerja yang mengalami perubahan. Perubahan ini juga perlu dikomunikasikan dengan petani yang menjadi kendala bagi penyuluh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Subak Kabupaten Bangli yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan saran yang mana diharapkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengimplementasian pupuk bersubsidi yakni dengan cara sebagai berikut:

1. Peningkatan penyuluhan secara rutin dan berkala memberikan panduan kepada setiap petani mengenai penggunaan pupuk yang sesuai. Pelatihan bagi petani tentang dosis pupuk, jenis pupuk, waktu pemupukan dan cara pemupukan sangat diperlukan dan alur penyesuaian pupuk bersubsidi.
2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli dapat melakukan perekrutan pegawai magang untuk melaksanakan penyuluhan. Dengan bertambahnya tenaga kerja magang bisa membantu pelaksanaan penyuluhan serta pendampingan kepada petani, sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan secara optimal.
3. Perlunya perhatian oleh pemerintah pusat terkait dengan anggaran khusus untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilakukan pelaksana pelayanan atau pendamping petani.
4. Bagi petani yang tidak mampu membeli pupuk subsidi karena kurangnya kemampuan ekonomi, petani dapat memaksimalkan penggunaan pupuk organik. Hal ini perlu pendampingan oleh pihak Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam proses pemanfaatan pupuk organik untuk padi.
5. Perlunya survei kepuasan atau pengaduan pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada kios/pengecer dan petani sebagai acuan atau target penjaminan peningkatan dan pengoptimalan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangli.
6. Bagi pihak Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangli, disarankan untuk melakukan pemantauan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer ke petani guna memastikan distribusi pupuk secara merata kepada petani di tingkat yang adil. Pengawasan diharapkan dilakukan oleh semua aktor baik dari petugas pengawas, dinas, distributor, pengecer, dan petani. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seimbang dari semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Abdoelloh. & Yudi Rusfiana 2016. Teori Analisis Kebijakan. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Akbari, A. E. (2020). Implementasi Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Tanaman Padi. In *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo* (Vol. 10, Issue 1).
- Bagong, Suyanto. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bandur, Agustinus. (2019). *Penelitian Kualitatif Studi Multi Disiplin Keilmuan Dengan Nvivo 12 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dalimunthe, L. S., Humaizi, H., & Kadir, A. (2021). Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(2), 664–677.
- detikSumbagsel. (2023). Ini Kriteria dan Mekanisme Penerima Pupuk Bersubsidi. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6796038/ini-kriteria-dan-mekanisme-penerima-pupuk-bersubsidi>
- Dr. Abdul Fattah Nasution, Mp. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Dun, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- DZAKIR, D. (2022). Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi di Desa Kamal Kecamatan Arjasa. In *Repository.Unej.Ac.Id*.
- Edward III, George C, 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Fajar Mulia. 2016. *Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Gayatri, K. P., Wirantari, I. D. A. P., & Yasintha, P. N. (2023). Implementasi Program Perbantuan Lapangan Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Tabanan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 1-12.
- Ginanjari, Nugraha Jiwapraja. 1980. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Acro.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Indriani, W. (2016). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian (Studi di Kabupaten Situbondo)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Jami, F. (2016). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. *PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 2–15.
- Jann, Werner dan Kai Wegrich. 2015. *Teori Siklus Kebijakan dalam Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*, editor Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney. Terj. Imam Baihaqie (hlm 61-89). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Karundeng, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohnuatu. *Jurnal Administro*, 4(1), 05–09.

- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 16/KPTS/RC.210/B/06/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022
- Kompas.com. (2023). Penyaluran Pupuk Subsidi Seret, Apa Pilihan Petani? <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231109092841-8-487601/penyaluran-pupuk-subsidi-seret-apa-pilihan-petani>
- Kompas.com. (2023). Pupuk Indonesia: Pupuk Bersubsidi Hanya Bisa Ditebus di Kios Resmi. <https://money.kompas.com/read/2023/12/27/103733926/pupuk-indonesia-pupuk-bersubsidi-hanya-bisa-ditebus-di-kios-resmi>
- M. Hakim. (2020). Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia.
- Maharani, N. P. (2018). Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur.
- Maulida, F., Prabawati, N. P. A., & Yasintha, P. N. (2019). IMPLEMENTASII PROGRAMI BEDAH RUMAH DI DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP WARGA MISKIN DI DESA CANGGU. sumber, 4, 20.
- MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013. TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulia, F. A. J. A. R. (2016). Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
- NIM, F. J. (2017). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 5(4).
- NIM, R. W. (2018). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 7(3).
- Pertanian, D. J. P. dan S. (2020). Kumpulan Peraturan Pupuk.
- Putra, I. W. W. S. (2020). Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. In Repository.ar-raniry.ac.id (Vol. 10, Issue 1).
- Ragimun dkk. 2020. Jurnal Ilmiah M-Progress. Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Vol. 10, No. 12. Manajemen FE Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
- Rahman, B. (2009). Kebijakan Subsidi Pupuk : Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. Agricultural Policy Analysis, 7(2), 131–146.
- Saluman, V. P., Pangemanan, S., & Undap, G. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). JURNAL EKSEKUTIF, 2(2).

- Sari, D.K., Yuswadi, H., & Murdyastuti, A. (2022). Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1110–1116.
- Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfa beta, Bandung
- Suharto, E. (2005), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Tititn Kurniatin, Suyeno, R. W. S. (2023). Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Kecamatan Kedungjajanag Kabupaten Lumajang. *Jurnal Respon Publik*, 17(13), 13–22.
- Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publikd. Yogyakarta: CAPS